



Pemerintah Kota Kediri

ALAI KOTA KEDIRI

DENGAN PERINGATAN 100 TAHUN KEMERDEKAAN NASIONAL
XXV TAHUN 2000, ADI, MELAKUKAKAN GERAKAN
LATIHAN MEWUJUDKAN KOTA DESTASI OLAH RAGA

LKJIP

**LAPORAN KINERJA
BPPKAD KOTA KEDIRI**

2022





KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2022. Penyusunan Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis BPPKAD Kota Kediri

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja BPPKAD Kota Kediri diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Komitmen, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022, ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BPPKAD Kota Kediri pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kediri, Pebruari 2023
**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KOTA KEDIRI**

SUGENG WAHYU P, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19750625 199803 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja BPPKAD Kota Kediri tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Capaian sasaran strategis 1 "Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan:

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu "Opini BPK terhadap LKD Pemda dengan rumus hitung yaitu Opini BPK terhadap LKD Pemerintah Kota Kediri pada Tahun N-1
- Capaian indikator dimaksud didukung 1 (Satu) Program, yakni Nama Pengelolaan Keuangan Daerah
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2022 adalah WTP, sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi WTP Dengan demikian kinerja BPPKAD Kota Kediri dengan indicator sasaran ini tercapai dengan capaian sebesar 100%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 yang juga tercapai WTP maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.
- Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPPKAD Kediri ke depan, yaitu bagaimana mempertahankan opini WTP tersebut karena opini WTP merupakan opini tertinggi dari BPK.

Capaian sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset:

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu "Persentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik dengan rumus hitung yaitu "Jumlah gol aset yang sudah terinventarisasi dengan baik dibandingkan dengan jumlah gol aset aset yang ada dikalikan 100 %.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh 1 (satu) Program, yakni Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2022 sebesar 43%, sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 43%. Dengan demikian kinerja BPPKAD Kota Kediri dengan indicator sasaran ini tercapai dengan capaian sebesar 100%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 100% terjadi peningkatan/penurunan yaitu sama sebesar 100
- Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPPKAD ke depan, sebagai berikut :
 1. Lambatnya Proses penghapusan yang membutuhkan waktu lama karena adanya ketergantungan dengan instansi lain (KPKNL)
 2. Lambatnya Proses pensertifikasian yang harus menggunakan pertimbangan teknis dari pertanahan setiap kali pengajuan.
 3. SDM yang ditunjuk oleh SKPD sebagai pengurus barang yang kurang kompeten, sehingga menyebabkan pengelolaan BMD menjadi kurang optimal



4. Koordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran SKPD yang belum berjalan dengan baik.
5. Orientasi pengadaan barang selama ini hanya membeli dan bukan mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan pengadministrasian dan pengendalian secara layak.
6. Banyaknya aset yang tidak didukung dengan data yang handal (keterbatasan data).

Capaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah:

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu:
 1. “Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas dengan rumus hitung yaitu “jumlah kriteria yang terpenuhi dibanding jumlah kriteria renja berkualitas dikali seratus persen
 2. Prosentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas dengan rumus hitung yaitu Formula jumlah kriteria yang terpenuhi dibanding jumlah kriteria renja berkualitas dikali seratus persen.
 3. Nilai Indeks profesionalisme aparatur (IPA) dengan rumus hitung yaitu nilai IPA BPPKAD Kota Kediri dengan menggunakan instrumen yang dikeluarkan oleh BPSDM
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh 1 (satu) Program, yakni Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut yaitu
 1. 75%, untuk pemenuhan kriteria renja berkualitas dan sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 60%. Dengan demikian kinerja BPPKAD Kota Kediri dengan indicator sasaran ini tercapai dengan capaian sebesar 85%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 60% maka terjadi peningkatan/penurunan
 2. 75%, untuk pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan berkualitas dan sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 75%. Dengan demikian kinerja BPPKAD Kota Kediri dengan indicator sasaran ini tercapai dengan capaian sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 75% terjadi peningkatan/penurunan
 3. 73 untuk nilai indeks professional aparatur teralisasi sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 81,56% Dengan demikian kinerja BPPKAD Kota Kediri dengan indicator sasaran ini tercapai dengan capaian sebesar 111,7%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 72,46 terjadi peningkatan yaitu sama sebesar 9,1
- Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPPKAD ke depan, sebagai berikut :
 1. Menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan yang selaras dengan dokumen perencanaan
 2. Melakukan pengelolaan keuangan yang akurat, handal dan dapat diperbandingkan
 3. Meningkatkan kompetensi SDM



Capaian sasaran strategis Meningkatnya PAD Diukur dengan indikator kinerja yaitu:

1. Persentase kenaikan PAD dengan rumus hitung yaitu Jumlah PAD tahun 2022 dikurangi Jumlah PAD tahun 2021 dibagi Jumlah PAD tahun 2021 dikalikan dengan 100%
 2. Prosentase jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih dengan rumus hitung yaitu jumlah penerimaan piutang tahun N dibandingkan dengan akumulasi jumlah baku piutang tahun-tahun sebelumnya dikalikan 100 persen .
 3. Prosentase kepatuhan WP dengan rumus hitung yaitu jumlah WP yang melapor dan membayar tepat waktu dibandingkan jumlah WP yang ada dikali seratus persen
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh 1 (satu) Program, yakni Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut yaitu
 1. 1,25%, untuk Prosentase kenaikan PAD dan sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi -27,42%. Dengan demikian kinerja BPPKAD Kota Kediri dengan indikator sasaran ini tercapai dengan capaian sebesar -2194%.
 2. 12%, untuk pemenuhan Prosentase jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih dan sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 10,57%. Dengan demikian kinerja BPPKAD Kota Kediri dengan indicator sasaran ini tercapai dengan capaian sebesar 88,08%.
 3. 70% untuk Prosentase kepatuhan WP sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 61,82% Dengan demikian kinerja BPPKAD Kota Kediri dengan indicator sasaran ini tercapai dengan capaian sebesar 88,31%.
 - Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPPKAD ke depan, sebagai berikut :
 1. Tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak yang masih rendah.
 2. Data yang tidak ter up to date yang menyebabkan surat tagihan yang tidak sampai kepada WP (dikarenakan alamat subyek pajak tidak sama dengan obyek pajak ; peralihan hak kepemilikan tidak disertai dengan mutasi SPPT PBB) sehingga menyulitkan petugas dalam penyampaian SKPD dan penagihannya.
 3. Belum dapat diterapkannya punishment secara penuh pada WP/WR yang tidak mau membayar.
 4. Belum adanya SDM Juru Sita yang terlatih.
 5. Belum dapat dihapusnya piutang yang macet/kadaluarsa

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	3
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	8
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Capaian Kinerja	33
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	34
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	35
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	40
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	44
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	45
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	45
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	54
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	55
3.2 Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	63
LAMPIRAN	67

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	3
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi dan Misi	7
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	9
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022	10
Tabel 2.4	Rencana Kerja Tahun 2022	13
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
Tabel 2.6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	15
Tabel 2.7	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Perangkat Daerah	23
Tabel 2.8	Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	24
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	34
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	35
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	40
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2021 dan 2022	43
Tabel 3.5	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	44
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	46
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	54
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	56
Tabel 3.9	Realisasi Pendapatan	58
Tabel 3.10	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

3



B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaporan Kinerja adalah tahap ke-4 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan, mekanisme tahapan teknis, substantif dan koordinasi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Kediri Nomor Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Daerah Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang

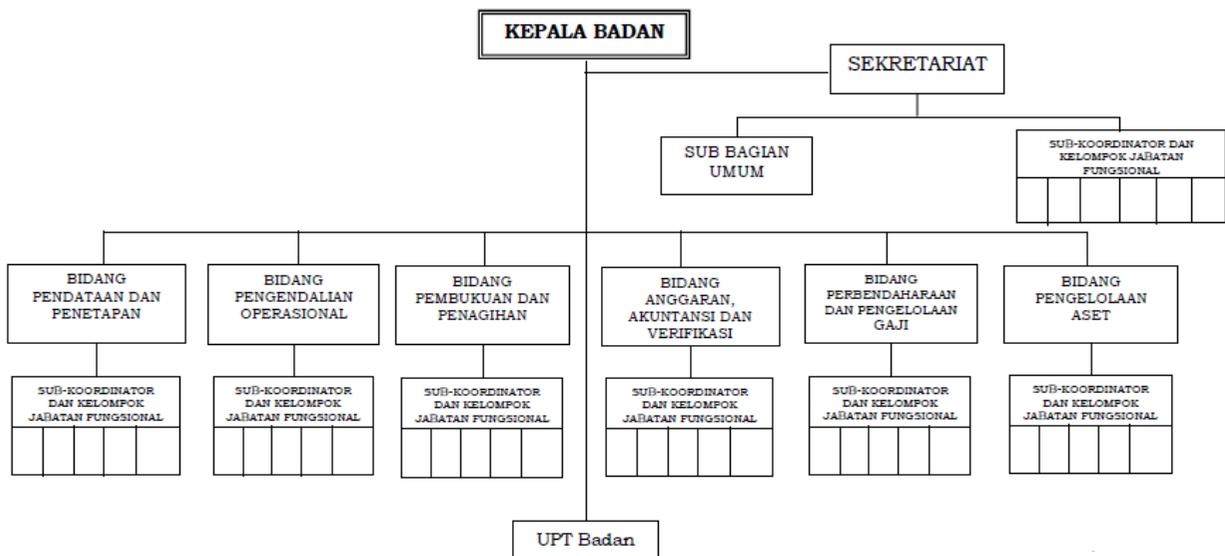
menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan serta tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Daerah Kediri mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- Pelaksanaan tugas teknis dibidang keuangan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Daerah Kediri.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Daerah Kediri.



Sumber : Lampiran Peraturan Walikota Kediri Nomor Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021

1.2.2 Anggaran

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kediri melaksanakan program dan kegiatan yang dengan anggaran yang dimiliki sebagai berikut.

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
APBD	Tahun n-1	Rp 83.227.268.264,00
APBD	Tahun n	Rp 51.143.053.780,00

Sumber : DPPA BPPKAD Tahun 2021 dan 2022

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

B A B I I PERENCANAAN KINERJA

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sebagai aparat teknis di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset mempunyai tanggung jawab membantu kelancaran dan keberhasilan tugas Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan pembangunan. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri diharapkan mampu mendorong terciptanya pelaksanaan tugas Pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan komitmen bersama dan seluruh aparat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mulai dari pimpinan maupun seluruh karyawan. Inilah yang menjadi dasar yang kuat dalam penetapan visi. Visi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempertimbangkan berbagai aspek penting terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Kediri, sebagai bagian integral dan Pemerintah Kota Kediri dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan melalui perda, maka dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kota Kediri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Visi pembangunan Kota Kediri yang ingindiwujudkan pada periode 2020-2024 adalah

“ Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni”

Penjelasan visi Kota Kediri tahun 2020-2024, sebagai berikut :

Kota Kediri Unggul

Merupakan perwujudan dari Kota Kediri yang unggul pada segala bidang. Kota Kediri Unggul merupakan gambaran sumber daya manusia dan layanan publik Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing. Keunggulan Kota Kediri tidak hanya keunggulan komparatif, tetapi juga keunggulan kompetitif.

Kota Kediri Makmur

Merupakan kondisi kehidupan individu dan masyarakat Kota Kediri yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan merata kesejahteraannya secara lahir dan batin. Kota Kediri yang makmur mencerminkan masyarakatnya dapat menggapai cita-cita yang ideal, berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif dalam tata kehidupan

Kota Kediri Harmoni

Kota Kediri yang harmoni mencerminkan kerukunan dan toleransi antar insan masyarakat serta keselarasan dengan alam lingkungan. Harmoni tercipta apabila terdapat keseimbangan antar unsur masyarakat, keguyuban atau kerukunan masyarakat dengan turut menghargai warisan budaya dan kelestarian alam.

Dalam rangka mewujudkan visi perlu disusun misi yang efektif agar visi dapat terwujud pada kurun waktu yang telah ditetapkan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sesuai dengan harapan untuk mewujudkan “Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni”, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkannya. Keterkaitan visi dan misi dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 2.1 - Keterkaitan Visi dan Misi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni	Kota Kediri Unggul	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi
		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya
	Kota Kediri Makmur	Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan
	Kota Kediri Harmoni	Mewujudkan Kota Kediri yang aman,nyaman,dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Visi “**Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni**”, secara substansi dijabarkan didalam 4 misi, sebagai berikut :

**Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi saat ini, semakin tinggi kualitas tata kelola pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasikan perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas yang didukung dengan teknologi informasi. Perbaikan tata kelola pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya

Untuk mewujudkan Kota Kediri yang unggul perlu dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya yang manusia memiliki kepribadian dan sikap mental yang baik, sehat, cerdas, menguasai ilmu dan teknologi, profesional dan kompeten yang dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya dan menghargai warisan budaya. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Misi 3 Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan

Kemakmuran masyarakat Kota Kediri dapat diwujudkan apabila perekonomian di Kota Kediri tumbuh secara merata dan stabil. Pertumbuhan ekonomi yang merata dapat diwujudkan dengan terus menggali potensi unggulan daerah serta meningkatkan kualitas dan pangsa pasar produk-produk unggulan. Untuk memperkuat perekonomian Kota Kediri serta menghadapi persaingan global, maka dikembangkan potensi ekonomi kreatif di Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi 4 Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Upaya mewujudkan Harmoni Kediri dilakukan dengan menciptakan kota yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan melalui kerukunan dan toleransi antar unsur masyarakat, meningkatkan kenyamanan hunian dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada

akhirnya dapat terwujud pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, indah dan ramah terhadap lingkungan.

2.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi,

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Target Kinerja Pada Tahun			
			Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	% golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	14%	14%	29%	43%	57%	71%
2	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKAD	BB	A	A	A	A	A
	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	N/A	60%	75%	75%	80%	85%
		Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	N/A	60%	75%	75%	80%	85%
		Nilai Indeks profesionalisme aparatur	N/A	71,00	72,11%	73%	74%	75%
3	Tujuan 3: Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (dlm %)	20,00	20,49	20,80	21,00	21,50	22
	Sasaran 3.1 Meningkatnya PAD	% Jumlah Piutang Pajak/ Retribusi yang tertagih	13%	8%	10%	12%	15%	17%
		% Kenaikan PAD	3%	-1,45%	1%	1,25%	1,50%	1,75%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Target Kinerja Pada Tahun			
			Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		% kepatuhan WP	N/A	60%	65%	70%	75%	80%

Sumber : Perubahan Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020 – 2024

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	
				Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.	Opini BPK terhadap LKD Pemda		Opini BPK atas LKD Pemerintah Kota Kediri pada kurun waktu tertentu (N-1)	Laporan BPK
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	% golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	%	$\frac{\sum \text{gol aset yang sudah terinventarisasi dengan baik}}{\text{Jmlh gol aset yang ada}} \times 100\%$	BI Gabungan
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	%	$\frac{\sum \text{kriteria yg terpenuhi}}{\sum \text{kriteria yang ada}} \times 100\%$	Dok perencanaan
		Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	%	$\frac{\sum \text{kriteria yg terpenuhi}}{\sum \text{kriteria yang ada}} \times 100\%$	Dok pengelolaan keuangan
		Nilai Indeks profesionalisme aparatur		Nilai IPA BPPKAD Thn N	Nilai IPA
4	Meningkatnya PAD	% Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang tertagih	%	$\frac{\sum \text{piutang pajak/retribusi yang tertagih}}{\sum \text{piutang pajak/retribusi yang ada}} \times 100 \%$	Buku piutang
		% Kenaikan PAD	%	$\frac{\sum \text{PAD th N} - (N-1)}{\sum \text{PAD th N-1}} \times 100\%$	LRA
		% kepatuhan WP	%	$\frac{\sum \text{WP yang melapor dan membayar tepat waktu}}{\sum \text{WP yang ada}} \times 100\%$	Laporan Bid PO

Sumber: Indikator Kinerja Utama Nama Perangkat Daerah Nama Daerah Tahun 2022

Definisi Operasional dari Tujuan dan Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama) diatas adalah sebagai berikut:

- ❖ Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi empat:

- a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
 - b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
 - c. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) yaitu opini yang diberikan ketika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.
 - d. Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- ❖ % golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik. Golongan aset dikatakan terinventarisasi dengan baik apabila terdapat catatan (informasi) yang lengkap mengenai nilai, jenis/spek, no surat yang melengkapi aset (Sertifikat, No BPKB dll), letak, fisik (luas/ ukuran/ jenis/ dll) dari aset. Golongan aset berdasarkan KIB dibagi menjadi 7 (tujuh) yaitu KIB A (tanah), KIB B (peralatan dan mesin), KIB C (gedung dan bangunan), KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi). KIB E (Aset tetap lainnya), KIB F (Kontruksi Dalam Pengerjaan) dan Aset Lainnya (software)
- ❖ Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP BPPKAD Kota Kediri. adalah hasil penilaian LAKIP TA N-1 yang dilakukan oleh APIP (Inspektorat Kota Kediri) terhadap penyusunan laporan akuntabilitas pertanggungjawaban di BPPKAD Kota Kediri yang meliputi lima komponen yaitu perencanaan, kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Periode

LAKIP yang dipilih N-1 karena pada saat penyusunan LAKIP tahun N, hasil evaluasi LAKIP tahun N belum selesai dilakukan oleh Inspektorat.

- ❖ Prosentase pemenuhan kriteria renja berkualitas. Renja dikatakan berkualitas jika:
 - Telah menyajikan indikator program yang berorientasi pada hasil (outcome).
 - Indikator kegiatan/sub kegiatan telah selaras dengan indikator program.
 - Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan telah ditetapkan dengan baik (selaras dengan Renstra OPD dan RPJMD).
 - Indikator output sub kegiatan mencerminkan keluaran langsung dari sub kegiatan.
 - Indikator DPA selaras dengan Renja.
- ❖ Prosentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas. Pengelolaan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Relevan, artinya dokumen pengelolaan keuangan disusun tepat waktu dan disusun secara lengkap.
 - Andal, artinya dokumen pengelolaan keuangan telah diverifikasi.
 - Dapat dibandingkan, artinya dokumen pengelolaan keuangan menyajikan informasi yang dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - Dapat dipahami, artinya dokumen pengelolaan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku.
- ❖ Nilai Indeks profesionalisme aparatur merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukurannya berdasarkan tingkat pendidikan, kompetensi pegawai, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas dan jabatannya.
- ❖ Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi rasio kemandirian

mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya. Semakin tinggi rasio kemandirian, juga menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

- ❖ Prosentase Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang tertagih dengan formula indikator Jumlah piutang yang tertagih dibagi jumlah seluruh piutang. Piutang Pajak/Retribusi adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak/retribusi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
- ❖ Prosentase Kenaikan PAD. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
- ❖ Prosentase Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Kepatuhan dilihat dari ketepatan waktu melaporkan dan membayar Wajib Pajak atas Pajak Daerah. Hanya wajib pajak PBB yang dipilih dan bukan semua wajib pajak dikarenakan PBB merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar selain Pajak Penerangan jalan dan BPHTB.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2022 :

**Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2022
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Kediri**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satu an	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang	Opini BPK terhadap LKD Pemda		WTP

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	akuntabel			
	Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda		WTP
	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	% golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	%	43%
2	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP BPPKAD		A
	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	%	75%
		Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	%	75%
		Nilai Indeks profesionalisme aparatur		73
3	Tujuan 3: Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (dlm %)	%	21,00
	Sasaran 3.1 Meningkatnya PAD	% Jumlah Piutang Pajak/ Retribusi yang tertagih	%	12%
		% Kenaikan PAD	%	1,25%
		% kepatuhan WP	%	70%

Sumber : Rencana Kerja BPPKAD Kota Kediri tahun 2022

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan

Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kediri Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan.	Ketepatan penetapan APBD, dan penyelesaian LKD Pemda	Tepat waktu
		% Golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	43%
		% Penerbitan SP2D yang tepat, cepat dan akurat	99%
2	Meningkatnya kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri	Nilai SAKIP BPPKAD Kota Kediri	BB
		Peningkatan kapasitas pegawai	8%
3	Meningkatkan PAD utamanya PAD yang dikelola BPPKAD	Prosentase Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang tertagih	19%
		Prosentase Kenaikan PAD	3%

Sumber : Perjanjian Kinerja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 26.611.186.591,-
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 20.887.373.200,-
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.148.022.300,-
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.679.448.313,-
JUMLAH	Rp. 52.326.030.404,-

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri :

**Tabel 2.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kediri Tahun 2022**

No	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri	Nilai SAKIP BPPKAD Kota Kediri	BB
		Peningkatan kapasitas pegawai	8%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%
		Persentase cakupan administrasi keuangan	91%
		Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	91%
		Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	91%
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan (RKA/DPA, RKA-P/DPPA, Renja)	5 dok
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Akuntabilitas Pertanggungjawaban	1 dok
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Aksi dan LHE Internal BPPKAD	10 dok
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 tahun
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan	12 bulan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan jasa pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kain batik tenun	250 potong
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyuluhan di bidang hukum	1 kali
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (9 jenis)	12 bulan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih (15 jenis)	12 bulan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor (42 jenis)	12 bulan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan kimia (3 jenis)	12 bulan
	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (10 jenis)	12 bulan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan (2 jenis)	12 bulan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun
	Pengadaan Mebel	Meubeleur (kursi rapat)	20 buah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor	5 jenis
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	12 bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jaminan kesehatan tenaga kontrak	12 bln
		Pembayaran PBB	1 OP
		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan
		Tersedianya Jasa instruktur olahraga	12 bln
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan
		Sewa kendaraan dinas	12 bulan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran perizinan dan pajak kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	50 unit 10 unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor (10 gedung)	12 bulan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja dan Gedung Kantor (4 jenis) Terpeliharanya Perlengkapan Kerja Gedung Kantor (4 jenis)	12 bulan 12 bulan
	Sasaran Strategis: Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan.	Ketepatan penetapan APBD, dan penyelesaian LKD Pemda	Tepat waktu
		% Golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	43%
		% Penerbitan SP2D yang tepat, cepat dan akurat	99%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dengantarget WTP	WTP
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 tahun
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS 2023	2 Dok
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUPA dan PPAS-P 2022	2 Dok
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya penelitian RKA 2023 : 100 SKPD	1 kali
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penilitian RKAP 2022 : 100 SKPD	1 kali
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya peneliitian DPA 2023 : 100 SKPD	1 kali
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penilitian DPPA 2022 : 100 SKPD	1 kali
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Perda dan Perwali APBD TA. 2022	2 Dok
		Raperda dan Perda APBD TA.2023	2 Dok
		Raperwali dan Perwali APBD TA. 2023	2 Dok
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perda dan Perwali Perubahan APBD TA. 2022	2 Dok
		Perwali Pergeseran APBD TA. 2022	2 Dok
		Raperda dan Raperwali Perubahan APBD TA. 2022	2 Dok
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 tahun



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, monitoring	12 bulan
		Laporan DAK fisik dan non fisik	12 laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK	12 laporan
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D yang tepat waktu	10000 SP2D
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bimtek penatausahaan keuangan daerah	1 kali
		Pendampingan dan konsultasi penatausahaan keuangan daerah	12 bulan
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 tahun
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan posisi kas	12 laporan
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan keuangan semester dan akhir tahun pemerintah daerah	2 Dok
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah, koordinasi, monitoring, evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12 bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	LKPD Pemerintah Kota Kediri	1 dok
		Raperda dan Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2021	2 Dok
		Raperwali dan Perwali Pertanggungjawaban APBD TA 2021	2 Dok
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Bimtek pengelolaan keuangan daerah 100 SKPD	3 kali
	Kegiatan Penunjang Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 tahun
	Belanja Tidak Terduga	Penyediaan beasiswa	12 bln



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penyediaan dana bantuan sosial tidak terencana dan belanja tidak terduga	12 bulan
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	29%
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 tahun
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD dan RKPBM	2 dok
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Penanganan perkara hukum (Opini LO)	5 paket
		Pensertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	93%
		Identitas kios	150 buah
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Proses Penilaian aset, penghapusan dan pemanfaatan aset	12 bulan
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan proses pemindahtanganan BMD dari SKPD yang mengajukan	100%
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Proses rekonsiliasi penyusunan laporan BMD dengan 100 SKPD	3 bulan
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan BMD	100 SKPD
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan BMD melalui desk	100 SKPD
	Sasaran Strategis Meningkatkan PAD utamanya PAD yang dikelola BPPKAD	Prosentase Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang tertagih	19%
		Prosentase Kenaikan PAD	3%
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Prosentase kenaikan PAD	3%
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1 tahun
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kegiatan undian lunas PBB	1 kali
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi dan penerimaan pembayaran PBB melalui mobiling	10 bulan
		Sosialisasi diberbagai jenis media; 12 bln	12 bulan
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan ulang OP/OR yang ada dalam database	122000 OP/OR
		Penilaian NJOP PBB	1 paket



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemeliharaan aplikasi pengelolaan pendapatan, database pajak /retribusi daerah dan jaringan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah	12 bln
		Sewa TMD	1 paket
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan SPT Pajak dan Retribusi	122000 SKPD/ SKRD
		Penyampaian SKPD/SKRD	122000 SKPD/ SKRD
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terselesainya permasalahan PBB dan penyediaan tempat pembayaran PBB 46 kelurahan	10 bulan
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Buku piutang Laporan pendapatan daerah	2 jenis 12 kali
	Penagihan Pajak Daerah	Optimalisasi penerimaan pendapatan dari piutang pajak dan retribusi	16%
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian SK Pengurangan, Kompensasi dan Restitusi Pajak Daerah	100%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Analisa Objek Pajak (9 OP) dan Objek Retribusi (2 OR)	12 bulan
		Pembinaan Wajib Pajak	100 WP
		Pemeriksaan Wajib pajak	25 WP

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022

	<u>Kegiatan/Sub Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 21.859.400,00
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.290.100,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.294.900,00
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.274.400,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.587.226.304,00
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.114.786.304,00
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	472.440.000,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.200.000,00
6.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00
7.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37.200.000,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 648.567.448,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

	<u>Kegiatan/Sub Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.490.000,00
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.969.000,00
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.441.600,00
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.317.200,00
12.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.974.600,00
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.051.048,00
14.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.324.000,00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	269.347.800,00
15.	Pengadaan Mebel	29.850.000,00
16.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	239.497.800,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.570.742.839,00
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	122.597.000,00
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	569.999.940,00
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	878.145.899,00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.242.800,00
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.884.500,00
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.988.300,00
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	201.370.000,00
VIII	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.028.784.100,00
23.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	62.797.800,00
24.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	63.850.100,00
25.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	33.539.500,00
26.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	13.646.000,00
27.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	157.377.600,00
28.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	157.377.600,00
29.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	290.941.100,00
30.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	249.772.000,00



	<u>Kegiatan/Sub Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>
	Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
IX	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp.	690.629.200,00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		86.375.000,00
31.			
32.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		171.901.800,00
33.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		199.755.400,00
34.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		232.597.000,00
X	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.167.959.900,00
35.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		35918000
36.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		26.855.500,00
XI	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		487.213.000,00
37.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran		433.453.400,00
38.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		184.520.000,00
XII	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		18.000.000.000,00
39.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		18.000.000.000,00
XIII	Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.148.022.300,00
40.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		32.516.500,00
41.	Pengamanan Barang Milik Daerah		331.386.100,00
42.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		189.163.800,00
43.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		70.472.900,00
44.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		428.043.700,00
45.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		70.704.000,00
46.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		25.735.300,00

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
XIV	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.679.448.313,00
47.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.018.961.500,00
48.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 585.556.631,00
49.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	747.859.800,00
50.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.445.216.853,00
51.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	373.331.000,00
52.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.000.924.500,00
53.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	45.713.910,00
54.	Penagihan Pajak Daerah	391.711.800,00
55.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	37.816.319,00
56.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	32.356.000,00
JUMLAH		Rp. 52.326.030.404,00

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan Oktober tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan perubahan RPJMD tahun 2020-2024 yang mempengaruhi perubahan tujuan, sasaran dan strategi serta Perubahan APBD yang mempengaruhi perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran, dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perubahan Perjanjian Kinerja
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kediri Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas penganggaran,	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	penatausahaan dan pelaporan keuangan		
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	Persentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	43%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	75%
		Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	75%
		Nilai Indeks profesionalisme aparatur	73
4	Meningkatnya PAD	% jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih	12%
		Persentase Kenaikan PAD	1,25%
		% kepatuhan WP	70%

Sumber : Perjanjian Kinerja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 26.434.117.605,-
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 18.429.476.562,-
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.252.431.300,-
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.027.028.313,-
JUMLAH	Rp. 51.143.053.780,-

Dengan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	75%
		Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	75%
		Nilai Indeks profesionalisme aparatur	73
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%
		Persentase cakupan administrasi keuangan	91%
		Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	91%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	91%
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	22 dok
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan (RKA/DPA, RKA-P/DPPA, Renja)	5 dok
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Akuntabilitas Pertanggungjawaban	1 dok
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Aksi dan LHE Internal BPPKAD	10 dok
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kegiatan keuangan Perangkat Daerah	12 bln
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan	12 bulan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan jasa pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 lap
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kain batik tenun	250 potong
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyuluhan di bidang hukum	1 kali
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 laporan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (9 jenis)	12 bulan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih (15 jenis)	12 bulan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor (42 jenis)	12 bulan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan kimia (3 jenis)	12 bulan
	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (10 jenis)	12 bulan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan (2jenis)	12 bulan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 laporan
	Pengadaan Mebel	Meubeleur (kursi rapat)	20 buah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor	5 jenis
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	12 bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jaminan kesehatan tenaga kontrak	12 bln
		Pembayaran PBB	1 OP
		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan
		Tersedianya Jasa instruktur olahraga	12 bln
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan
		Sewa kendaraan dinas	4 bulan
		Jasa Konsultasi	1 Paket
		Pembuatan Vidio Profil	1 Paket
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran perizinan dan pajak kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	50 unit 10 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor (10 gedung)	12 bulan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja dan Gedung Kantor (4 jenis) Terpeliharanya Perlengkapan Kerja Gedung Kantor (4 jenis)	12 bulan 12 bulan
	Sasaran Strategis: Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan.	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dengantarget WTP	WTP
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	12 bulan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS 2023	2 Dok
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUPA dan PPAS-P 2022	2 Dok
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya penelitian RKA 2023 : 101 SKPD	1 kali
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penilitian RKAP 2022 : 101 SKPD	1 kali
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya peneliitian DPA 2023 : 101 SKPD	1 kali
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penelitian DPPA 2022 : 101 SKPD	1 kali
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Perda dan Perwali APBD TA. 2022	2 Dok
		Raperda dan Perda APBD TA.2023	2 Dok
		Raperwali dan Perwali APBD TA. 2023	2 Dok
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perda dan Perwali Perubahan APBD TA. 2022	2 Dok
		Perwali Pergeseran APBD TA. 2022	2 Dok
		Raperda dan Raperwali Perubahan APBD TA. 2022	2 Dok
		Kajian	1 Dok
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	12 laporan
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, monitoring	12 bulan
		Laporan DAK fisik dan non fisik	12 laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan pemungutan/pematangan dan penyetoran PFK	12 laporan
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D yang tepat waktu	10000 SP2D
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Bimtek penatusahaan keuangan daerah	1 kali



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kabupaten/Kota	Pendampingan dan konsultasi penatausahaan keuangan daerah	12 bulan
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	12 laporan
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan posisi kas	12 laporan
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan keuangan semester dan akhir tahun pemerintah daerah	2 Dok
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah, koordinasi, monitoring, evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12 bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	LKPD Pemerintah Kota Kediri	1 dok
		Raperda dan Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2021	2 Dok
		Raperwali dan Perwali Pertanggungjawaban APBD TA 2021	2 Dok
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Bimtek pengelolaan keuangan daerah 101 SKPD	3 kali
	Kegiatan Penunjang Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan kegiatan Penunjang Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 laporan
	Belanja Tidak Terduga	Penyediaan beasiswa	12 bulan
		Penyediaan dana bantuan sosial tidak terencana dan belanja tidak terduga	12 bulan
	Sasaran Strategis: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	Persentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	43%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	29%
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Dokumen RKBMD dan RKPBMMD	2 dok



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Daerah		
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Penanganan perkara hukum (Opini LO)	4 paket
		Pensertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	85%
		Identitas kios	150 buah
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Proses Penilaian aset, penghapusan dan pemanfaatan aset	12 bulan
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan proses pemindahtanganan BMD dari SKPD yang mengajukan	12 bulan
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Proses rekonsiliasi penyusunan laporan BMD dengan 100 SKPD	3 bulan
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan BMD	101 SKPD
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan BMD melalui desk	101 SKPD
	Sasaran Strategis Meningkatkan PAD	% jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih	12%
		Persentase Kenaikan PAD	1,25%
		% kepatuhan WP	70%
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Prosentase kenaikan PAD	3%
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	12 laporan
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kegiatan undian lunas PBB	1 kali
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan
		Kegiatan penghargaan pajak daerah	1 kali
		kegiatan undian pajak	1 kali
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi dan penerimaan pembayaran PBB melalui mobiling	10 bulan
		Sosialisasi diberbagai jenis media; 12 bln	3 jenis
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan ulang OP/OR yang ada dalam database	122000 OP/OR
		Penilaian NJOP PBB	1 paket



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Sasaran Startegis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemeliharaan aplikasi pengelolaan pendapatan, database pajak / retribusi daerah dan jaringan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah	12 bln
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan SPT Pajak dan Retribusi	122000 SKPD/ SKRD
		Penyampaian SKPD/SKRD	122000 SKPD/ SKRD
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terselesainya permasalahan PBB dan penyediaan tempat pembayaran PBB 46 kelurahan	10 bulan
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Buku piutang Laporan pendapatan daerah	2 jenis 12 kali
	Penagihan Pajak Daerah	Optimalisasi penerimaan pendapatan dari piutang pajak dan retribusi	16 %
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian SK Pengurangan, Kompensasi dan Restitusi Pajak Daerah	12 bulan
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Analisa Objek Pajak (9 OP) dan Objek Retribusi (2 OR)	12 bulan
		Pembinaan Wajib Pajak	90WP
		Pemeriksaan Wajib pajak	135 WP
		Kajian peningkatan pendapatan daerah	1 dok

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022

<u>Kegiatan/Sub Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 21.859.400,00
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.290.100,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.294.900,00
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.274.400,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.261.241.118,00
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.918.521.118,00
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	342.720.000,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.700.000,00
6.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00
7.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.700.000,00



	<u>Kegiatan/Sub Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	836.711.427,00
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.083.000,00
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.162.200,00
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	103.121.600,00
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.317.200,00
12.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.974.600,00
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	539.728.827,00
14.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.324.000,00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	994.297.800,00
15.	Pengadaan Mebel	86.850.000,00
16.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	907.447.800,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.655.065.060,00
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.597.000,00
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	621.999.940,00
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	915.468.120,00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.242.800,00
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.884.500,00
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 229.988.300,00
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.370000,00
VIII	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.056.593.900,00
23.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	62.797.800,00
24.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	63.850.100,00
25.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	33.539.500,00
26.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	13.646.000,00
27.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	135.316.600,00



	<u>Kegiatan/Sub Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>
28.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	149.944.800,00
29.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	294.001.100,00
30.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	303.498.000,00
IX	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	701.229.200,00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,	68.375.000,00
31.	Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
32.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	136.901.800,00
33.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	204.755.400,00
34.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	291.197.000,00
X	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.038.364.900,00
35.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	36.393.000
36.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	31.355.500,00
XI	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	487.208.000,00
37.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Rp. 298.888.400,00
38.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	184.520.000,00
XII	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.633.288.562,00
39.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.633.288.562,00
XIII	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.252.431.300,00
40.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15.185.500,00



	<u>Kegiatan/Sub Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>
41.	Pengamanan Barang Milik Daerah	384.346.100,00
42.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	271.083.800,00
43.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	61.472.900,00
44.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	432.903.700,00
45.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	61.704.000,00
46.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	25.735.300,00
XIV	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.027.028.313,00
47.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.178.761.500,00
48.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	649.856.631,00
49.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	758.259.800,00
50.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	409.296.853,00
51.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	436.331.000,00
52.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.000.924.500,00
53.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	45.713.910,00
54.	Penagihan Pajak Daerah	391.711.800,00
55.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	37.816.319,00
56.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	118.536.000,00
	JUMLAH	Rp. 51.143.053.780,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

✚ Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Sedangkan pengukuran efektifitas belanja dilakukan dengan memperbandingkan antara realisasi anggaran yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (SKPD) dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996 tentang kriteria

penilaian dan kinerja keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran adalah sebagai berikut:

✚ Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	WTP	100%	Sangat tinggi	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	Persentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	43%	43%	100%	Sangat tinggi	KIB
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	75%	60%	85%	tinggi	Data diolah
		Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	75%	75%	100%	Sangat tinggi	Data diolah
		Nilai Indeks profesionalisme aparatur	73	81,56	111,7%	Sangat tinggi	Instrumen Pengukuran IPA
4	Meningkatnya PAD	% jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih	12%	10,57%	88,08%	tinggi	Laporan MCP
		Persentase Kenaikan PAD	1,25%	-27,42%	-2194%	Sangat rendah	LRA
		% kepatuhan WP	70%	61,82 %	88,31%	tinggi	Aplikasi monev

Sumber : Data BPPKAD diolah

Analisa tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

❖ Meningkatkan akuntabilitas penganggaran, penantausahaan dan pelaporan keuangan

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan dari BPK

Indikator untuk mengukur sasaran strategis ini adalah Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) dengan target WTP. Opini BPK merupakan salah satu indikator yang menunjukkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standard akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern.

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari empat kelompok, yaitu :

1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

3) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) adalah opini yang diberikan ketika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.

4) Tidak Wajar

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Kediri senantiasa berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat dicapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP bukanlah suatu tujuan tetapi merupakan prasyarat yang menggambarkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Beberapa catatan yang terdapat dalam laporan

keuangan yang telah diaudit bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan.

Opini yang digunakan untuk indikator ini adalah opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri tahun n-1 (2021), karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2022 masih akan diaudit BPK-RI, sehingga saat ini belum diketahui opini BPK-RI atas LKPD Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2022. Opini BPK atas LKPD Pemerintah Kota Kediri Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% (**Sangat tinggi**).

Opini WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Perolehan opini WTP BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Kediri 9 tahun berturut-turut, selama tahun 2014-2022 merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mempertahankannya capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD 2020 -2024. Capaian itu bukti dari komitmen kuat Pemerintah Kota Kediri untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan.

❖ **Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
% golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	43%	43%	100%

Sumber: Data Bidang Pengelolaan Aset yang diolah

Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah prosentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik dengan target 73%. Formula untuk menghitung prosentase ini adalah perbandingan Jumlah gol aset yang sudah terinventarisasi dengan baik dibandingkan dengan jumlah gol aset aset yang ada dikalikan 100 %. Sampai dengan tahun 2022 BPPKAD sudah menginventarisasi dengan mengidentifikasi nilai, jenis/spek, no surat yang melengkapi aset (Sertifikat, No BPKB dll), letak, fisik (luas/ ukuran/ jenis/ dll) dari aset dan mencatat secara lengkap di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk 3 (tiga) golongan aset

yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), Tanah dan Software. Sehingga dengan 7 (tujuh) golongan aset yang ada, maka realisasi sebesar 43% dengan capaian kinerja 100% dan tergolong **sangat tinggi**.

❖ **Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
% pemenuhan kriteria renja berkualitas	75%	60%	85%
% pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan berkualitas	75%	75%	100%
Nilai indeks profesional aparatur	73	81,56	111,7%

Sumber: Data Sekretariat yang diolah

a. Prosentase pemenuhan kriteria renja berkualitas dengan target 75%. Formula yang digunakan yaitu jumlah kriteria yang terpenuhi dibanding jumlah kriteria renja berkualitas dikali seratus persen. Dari ke lima syarat/kriteria renja berkualitas, hanya 3 kategori yang dapat dipenuhi, sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 60%, dengan capaian kinerja sebesar 85% dan dikategorikan **tinggi**. Pencapaian indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dari 4 program yang dilaksanakan pada tahun 2022, telah menyajikan indikator program yang berorientasi hasil. Namun untuk indikator program pengelolaan keuangan daerah, indikatornya terlalu tinggi dan sama dengan indikator sasaran RPJM, sehingga kesulitan untuk menetapkan indikator sasaran di Renstra OPD dan berakibat indikator sasaran RPJM sama dengan indikator sasaran Renstra dan juga sama dengan indikator program.
- Dari 13 indikator kegiatan dan 56 indikator sub kegiatan telah selaras/mendukung indikator program.
- Target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan telah ditetapkan dan selaras dengan Perubahan Renstra BPPKAD tahun 2020-2024 dan RPJMD Kota Kediri tahun 2020-2024.
- Semua indikator keluaran sub kegiatan telah mencerminkan keluaran langsung dari sub kegiatan.

- Ada beberapa Indikator DPA yang tidak sama dengan indikator Renja.
- b. Prosentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas dengan target 75%. Formula jumlah kriteria yang terpenuhi dibanding jumlah kriteria renja berkualitas dikali seratus persen. Dari ke empat syarat/kriteria pengelolaan keuangan berkualitas, hanya 3 (tiga) kategori yang dapat dipenuhi, sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 75%, dengan capaian kinerja sebesar 100% dan dikategorikan **sangat tinggi**. Pencapaian indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Semua dokumen pengelolaan keuangan telah disusun secara lengkap tetapi ada beberapa yang tidak dapat disusun tepat waktu.
 - Dokumen pengelolaan keuangan telah diverifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) BPPKAD Kota Kediri
 - Dokumen pengelolaan keuangan dalam hal ini laporan keuangan telah menyajikan informasi yang dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - Dokumen Pengelolaan keuangan telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku.
- c. Nilai Indeks profesionalisme aparatur (IPA) dengan target 73. Pengukuran secara mandiri nilai IPA BPPKAD Kota Kediri dengan menggunakan instrumen yang dikeluarkan oleh BPSDM Kota Kediri diperoleh nilai sebesar 81,56. Dengan realisasi tersebut capaian untuk indikator ini sebesar 111,7% dan dikategorikan sangat tinggi.

❖ Meningkatkan PAD

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
% jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih	12%	10,64%	88,08%
Persentase Kenaikan PAD	1,25%	-27,42%	-21,93%
% kepatuhan WP	70%	61,82%	88,31%

Sumber: Data Bidang Pembukuan dan Penagihan, PO dan Pendataan yang diolah

- a. Prosentase jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih dengan target sebesar 12%. Formula yang digunakan untuk menghitung

indikator ini adalah jumlah penerimaan piutang tahun N dibandingkan dengan akumulasi jumlah baku piutang tahun-tahun sebelumnya dikalikan 100 persen. Jumlah tunggakan pajak dan retribusi per 31 Desember tahun 2021 yang menjadi baku piutang tahun 2022 adalah sebesar Rp 37.176.895.496,00. Jumlah piutang pajak tertagih adalah sebesar Rp. 3.929.178.698,00 atau sebesar 10,57% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 88,08% dan termasuk dalam kategori **tinggi**.

- b. Prosentase kenaikan PAD dengan target 1,25%. Formula untuk menghitung indikator ini adalah Jumlah PAD tahun 2022 dikurangi Jumlah PAD tahun 2021 dibagi Jumlah PAD tahun 2021 dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2022 realisasi PAD Kota Kediri berdasarkan SIMDA Keuangan per 16 Januari 2023 sebesar Rp. 319.295.604.320,24 sedangkan realisasi PAD tahun 2021 sebesar 439.896.279.120,18 dan terdapat penurunan sebesar Rp 120.600.674.799,94, sehingga realisasi kinerja untuk indikator ini adalah sebesar -27,42% dengan capaian kinerja sebesar -2194% dan termasuk dalam kategori **sangat rendah**.
- c. Prosentase kepatuhan WP dengan target 70%. Formula yang digunakan yaitu jumlah WP yang melapor dan membayar tepat waktu dibandingkan jumlah WP yang ada dikali seratus persen. Pada tahun 2022 dari 94.773 Nomor Objek Pajak (NOP) yang membayar tepat waktu sejumlah 58.586 NOP atau 61,82%. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 88,31% dan termasuk dalam kategori **tinggi**.

✚ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2020 dan 2021 diuraikan pada table berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
			Realisasi	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan 1: Terwujudnya	Opini BPK terhadap LKD	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
			Realisasi	Realisasi	Tar-get	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Pemda					
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	% golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	14%	29%	43%	43%	100%
4	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP BPPKAD	A	A	A	A	100%
5	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	60%	60%	75%	60%	85%
		Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	60%	75%	75%	75%	100
		Nilai Indeks profesionalisme aparatur	71	72,46	73	81,56	111,7%
6	Tujuan 3: Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (dlm %)	20,49%	29,15%	21%	21,97%	104,62%
7	Sasaran 3.1 Meningkatnya PAD	% Kenaikan PAD	-1,45%	67,33%	1,25%	-27,42%	-2194%
		% Jumlah Piutang Pajak/ Retribusi yang tertagih	8%	9%	12%	10,57%	88,08%
		% kepatuhan WP	56,23%	57,05%	70%	61,82%	88,31%

Sumber: Data BPPKAD yang diolah

❖ Tujuan 1 Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel

Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun terakhir, capaian untuk indikator tujuan ini tidak terdapat kenaikan/penurunan. Indikator opini BPK dengan capaian WTP sudah merupakan capaian yang paling baik.

❖ **Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan**

Indikator sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas penganggaran dan penatausahaan pelaporan keuangan adalah sama dengan indikator tujuan terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional, dengan hasil dan capaian indikator yang sama dengan 2 tahun terakhir yaitu WTP dan sesuai dengan target (100%)

❖ **Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset**

Realisasi indikator sasaran ini jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun terakhir selalu ada peningkatan. Tetapi jika dibandingkan capaian indikatornya dengan dua tahun terakhir tidak ada kenaikan/penurunan capaian indikator dimana untuk tahun 2020 dan 2021 capaian indikator sebesar 100% atau sesuai target.

❖ **Tujuan 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD**

Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKAD untuk tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi 2 (dua) tahun terakhir tidak ada kenaikan/penurunan yaitu terealisasi A atau sesuai target.

❖ **Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah**

Indikator kinerja untuk mengukur sasaran ini adalah:

- a. Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas.

Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun terakhir, realisasi tahun 2022 tidak mengalami kenaikan yaitu tetap sebesar 60%.

- b. Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas. Jika dibandingkan dengan 2021, realisasi tahun 2022 tidak terdapat kenaikan atau tetap sebesar 75%, tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 5%.

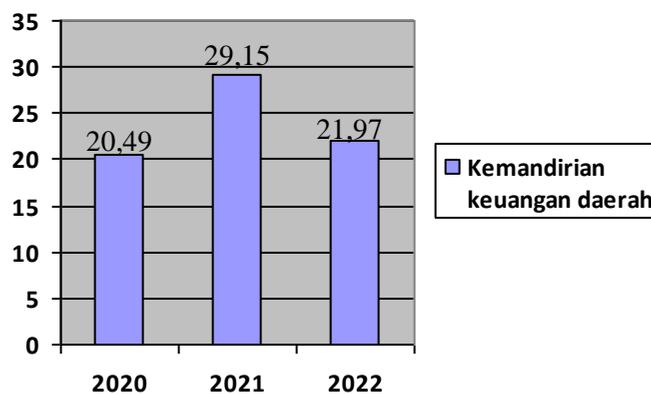
- c. Nilai Indeks profesionalisme aparatur (IPA). Realisasi IPA BPPKAD tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar 9,1 jika dibandingkan dengan nilai IPA Tahun 2021 dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 10,56.

❖ **Tujuan 3 Terwujudnya kemandirian keuangan daerah**

Realisasi indikator kinerja untuk mengukur tujuan terwujudnya kemandirian keuangan daerah pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, mengalami penurunan sebesar

7,18%. Pada tahun 2021 rasio kemandirian keuangan daerah sangat besar dikarenakan pada tahun 2021 penerimaan PAD mengalami kenaikan yang signifikan pada pos lain-lain PAD yang sah utamanya dari pendapatan BLUD akibat dari lonjakan pasien covid-19 pada masa pandemi, dan kondisi ini sifatnya tidak berulang. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 (pada saat kondisi normal) realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,48%.

Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2020 – 2022 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



❖ Sasaran 3.1 Meningkatnya PAD

Indikator kinerja untuk mengukur sasaran ini adalah:

- Prosentase Kenaikan PAD tahun 2022 turun sebesar 27,42% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan PAD selama 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2020 s/d 2022) sangat fluktuatif. Penerimaan PAD tahun 2021 sebesar Rp. 439.896.279.120,18 dengan penerimaan PAD tahun 2022 sebesar Rp. 319.295.604.320,24 maka terdapat penurunan sebesar Rp 120.600.674.788,94. Hal ini dikarenakan penerimaan BLUD yang sangat besar pada saat pandemi covid-19. Penerimaan PAD pada tahun 2020 sebesar Rp 262.886.289.227,78 jika dibandingkan pada tahun 2022 Rp 319.295.604.320,24 terdapat kenaikan sebesar Rp 56.409.315.092,46 atau naik sebesar 21,45%.

Penerimaan PAD Tahun 2022 dibandingkan dengan PAD Tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

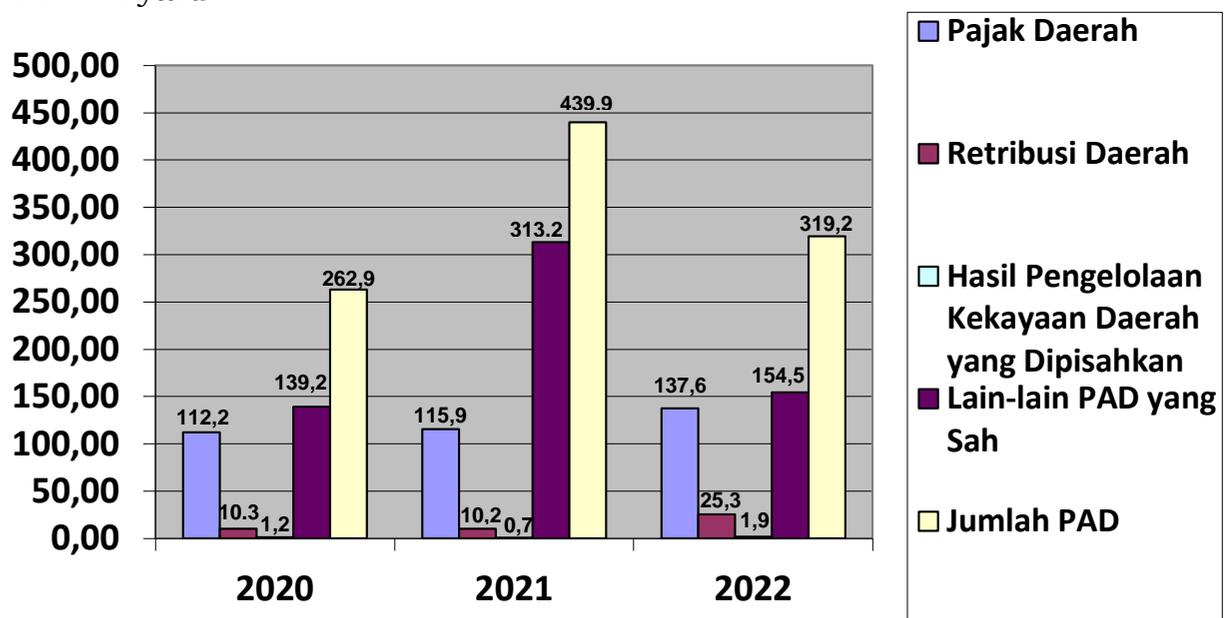
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2021 dan 2011

Jenis PAD	Realisasi		Bertambah/ (Berkurang)
	2022	2021	
Pajak Daerah	137.509.757.025,00	115.831.411.161,66	21.678.345.863,34
Retribusi Daerah	25.328.365.948,00	10.185.300.713,00	15.143.065.235,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.981.685.048,28	701.149.136,05	1.280.535.912,23
Lain-lain PAD yang Sah	154.475.796.298,96	313.178.418.109,47	(158.702.621.810,51)
Jumlah	319.295.604.320,24	439.896.279.120,18	(120.600.674.799,94)

Sumber: LRA BPPAKD tahun 2021 dan 2022

Kinerja peningkatan PAD Tahun 2020 - 2022 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Dlm milyar



- b. Prosentase Jumlah Piutang Pajak/ Retribusi yang tertagih pada tahun 2022 terealisasi sebesar 10,57%. Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun terakhir pada tahun 2022 naik sebesar 1,57% dibandingkan tahun 2021 dan naik sebesar 2,57% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan realisasi tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 1% dan kenaikan realisasi dari tahun 2021 ke tahun 2022 naik sebesar 1,57% sehingga rata-rata kenaikan selama 2 (dua) tahun terakhir sebesar 1,2%.
- c. Prosentase kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2022 terealisasi sebesar 61,82%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi tahun 2022 naik sebesar 4,77% dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 naik sebesar 5,59%. Rata-rata kenaikan kepatuhan wajib pajak tiap tahun sebesar 2,80%.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Perubahan Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri periode 2020-2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	WTP	100%
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	WTP	100%
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	% golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	43%	71%	60,56%
4	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP BPPKAD	A	A	100%
5	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	60%	85%	70,58%
		Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	75%	85%	88,23%
		Nilai Indeks profesionalisme aparatur	81,56	75	108,75%
6	Tujuan 3: Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (dlm %)	21,97%	22%	99,86%
7	Sasaran 3.1 Meningkatnya PAD	% Kenaikan PAD	-27,42%	1,75 %	-1566%
		% Jumlah Piutang Pajak/ Retribusi yang tertagih	10,57%	17%	62%
		% kepatuhan WP	61,82%	80%	77,27%

Sumber : Data BPPKAD yang diolah

Jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis BPPKAD, realisasi kinerja tahun 2022 dari 3 indikator kerja tujuan ada 2 (dua) indikator yang sudah mencapai 100% yaitu Opini BPK terhadap LKD Pemda dan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKAD serta 1 indikator tujuan masih terealisasi 99,86%. Sedangkan untuk indikator sasaran, dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran ada 1 (satu) indikator yang sudah mencapai target akhir renstra bahkan lebih dari 100%, sisanya sebanyak 7 (tujuh) indikator belum mencapai target akhir renstra.

+ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional (jika ada)

Sampai saat ini belum ada standar nasional baik dalam bentuk SPM (standar pelayanan minimal) ataupun standar lain terkait dengan pengeloan pendapatan, keuangan dan aset yang dapat dijadikan perbandingan realisasi kinerja.

+ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan disajikan pada table berikut :



Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD Pemda	WTP	WTP	100%	1. LKPD Kota Kediri telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. 2. Kecukupan pengungkapan 3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan. 4. Efektifitas SPI	
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKPD Pemda	WTP	WTP	100%		
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	% golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	43%	43%	100%	Koordinasi yang intens dengan pengurus barang yang ada di OPD seluruh kota kediri	
4	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP BPPKAD	A	A	100%	Telah dilaksanakannya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.	
5	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	75%	60%	85%	Kurangnya koordinasi dengan Bappeda	Menyesuaikan indikator di dokumen perencanaan dan penganggaran dengan cara berkoordinasi dengan Bappeda sebagai SKPD pengkoordinasi perencanaan
		Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	75%	75%	100%	1. Pengelolaan keuangan dilakukan oleh SDM yang kompeten 2. Adanya komitmen pimpinan dalam pengelolaan keuangan	Terus meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tar-get	Reali-sasi	% Capai-an	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						yang berkualitas	
		Nilai Indeks profesionalisme aparatur	73	81,56	111,7%	Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikut sertakan kedalam kegiatan bimtek, diklat, sosialisasi/seminar baik yang diadakan oleh BPPKAD ataupun OPD lain	
6	Tujuan 3: Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandiran keuangan daerah (dlm %)	21%	21,97%	104,62%	Peningkatan PAD	
7	Sasaran 3.1 Meningkatnya PAD	% Kenaikan PAD	1,25%	-27,42%	-2194%	Penurunan jumlah pasien akibat covid-19 yang cukup dratis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
		% Jumlah Piutang Pajak/ Retribusi yang tertagih	12%	10,57%	88,08%	Masih banyaknya piutang kadaluarsa dan piutang macet	1. Penyusunan Perwali tentang Penghapusan Piutang 2. Kerjasama dengan Kejaksaan untuk menagih piutang
		% kepatuhan WP	70%	61,82%	88,31%	Masih kurangnya tingkat kesadaran WP/WR dalam membayar kewajibannya	1. Kegiatan pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak 2. Kegiatan sosialisasi

Sumber :....

❖ **Tujuan 1 sasaran 1** dengan indikator kinerja: Opini BPK terhadap LKPD Pemda dengan target WTP terealisasi WTP (100%). Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja ini adalah terpenuhinya 4 (empat) kriteria yaitu:

- a. Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam hal ini LKPD Kota Kediri telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Laporan keuangan Pemerintah Kota Kediri berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
- b. Kedua kecukupan pengungkapan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Kediri sudah diungkap secara memadai (jelas dan detail).
- c. Ketiga, kepatuhan terhadap perundang-undangan. Semua yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri mematuhi aturan perundang-undangan. Tidak terdapat *fraud* atau tindakan kecurangan.
- b. Keempat, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pemerintah Kota Kediri selalu meningkatkan SPI sehingga apa yang direncanakan berjalan dengan baik.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP dilakukan beberapa strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain:

- a. Penguatan perencanaan, penganggaran, sistem akuntansi/pencatatan dan tata kelola pemerintahan;
- b. Penguatan komitmen daerah dan integritas mulai dari staf sampai dengan pimpinan, serta para pengelola dan pelaksanaan kegiatan;
- c. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggung jawab yang didukung oleh regulasi dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku;
- d. Menindaklanjuti temuan/ rekomendasi BPK atas pemeriksaan terdahulu.
- e. Penguatan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara bertahap dan berkesinambungan;

- f. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi informasi, yaitu melalui SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD juga SIPD.
- g. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan dan reviu atas Laporan Keuangan.
- h. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan dan studi tiru.

✚ **Tujuan 1 sasaran 2** dengan target kinerja prosentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik terealisasi 100%. Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja ini adalah adanya koordinasi/rekonsiliasi yang intens dengan pengurus barang di OPD untuk menginventarisasi barang-barang yang digunakan di OPD-nya masing-masing. Selain itu juga adanya peningkatan kapasitas SDM dibidang pengelolaan asset dengan melakukan FGD pengamanan BMD dengan Kejaksaan RI.

✚ **Tujuan 2** dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKAD dengan target A terealisasi 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa BPPKAD telah dilaksanakannya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

- a. Adanya keterlibatan pimpinan instansi secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) dari unit kerja/instansi.
- b. Adanya keterlibatan pimpinan instansi secara langsung dalam proses penyusunan penetapan kinerja, strategi pencapaian, dan ukuran keberhasilan atau indikator kinerja.
- c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala sesuai dengan ukuran keberhasilan kinerja.
- d. Adanya keterlibatan pimpinan secara langsung dalam merumuskan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi hasil dan IKU tambahan sesuai dengan konteks dan karakteristik unit kerja/instansi yang mendukung peningkatan pelayanan publik.
- e. Keterlibatan pimpinan instansi secara langsung dalam rapat perencanaan kegiatan dan anggaran.

- f. Perumusan data kinerja, pengukuran kinerja dan menyusun laporan kinerja tepat waktu.
- g. Pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- h. Evaluasi kinerja dalam rangka implementasi SAKIP telah disusun secara periodik.

Tujuan 2 sasaran 1 dengan indikator kinerja:

- a. Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas terealisasi sebesar 85%. Kegagalan dalam pencapaian target (tidak terealisasi 100%) dikarenakan kurang koordinasi dengan Bappeda dalam menentukan indicator kinerja di dokumen RPJMD, Renstra BPPKAD dan DPA BPPKAD, sehingga ada 2 kriteria renja berkualitas yang tidak terpenuhi.
- b. Prosentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas terealisasi 100%. Keberhasilan dalam pencapaian target dikarenakan dokumen pengelolaan keuangan telah disusun secara relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keberhasilan pencapaian target ini juga didukung oleh adanya SDM yang kapabel dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan komitmen pimpinan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang berkualitas.
- c. Nilai Indeks profesionalisme aparatur dengan realisasi 111,7%. Keberhasilan pencapaian indicator ini dikarenakan Pada tahun 2022, BPPKAD mendukung ASN untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengirimkan stafnya untuk mengikuti diklat, bimtek maupun sosialisasi/workshop yang diadakan oleh instansi lain. Selain itu BPPKAD juga menyelenggarakan kegiatan diklat/bimtek yang terkait dengan tupoksi BPPKAD yang antara lain sebagai berikut:
 - Bimtek penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi SIPD.
 - Bimtek tindaklanjut elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah,

- Sosialisasi dan bimtek pengelolaan persediaan menggunakan aplikasi SIBAPER.
- FGD pengamanan BMD
- Pelatihan audit internal manajemen mutu
- Sosialisasi pemahaman manajemen mutu ISO 9001:2015
- Sosialisasi pencegahan korupsi dan gratifikasi

❖ **Tujuan 3** dengan indikator kinerja Rasio kemandirian keuangan daerah terealisasi sebesar 104,62%. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis. Dengan adanya berbagai upaya diatas dan dan diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan kontribusi masyarakat semakin meningkat pula dan penerimaan PAD menjadi semakin tinggi.

❖ **Tujuan 3 sasaran 1** dengan indikator kinerja

a. Prosentase Kenaikan PAD terealisasi sebesar -2194% atau tidak mencapai target. Dari 4 komponen PAD, ada 3 komponen PAD yang realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan, realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, terutama pada pendapatan BLUD. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat lonjakan pasien akibat pandemi Covid-19 yang juga berimbas pada kenaikan layanan kesehatan sehingga meningkatkan pendapatan BLUD. Penangan pandemi yang baik berdampak pada penurunan kasus pandemi Covid-19 sehingga jumlah pasien pun berkurang **drastis**. Hal ini juga berdampak pada penurunan pendapatan BLUD tahun 2022 secara **drastis** jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Meskipun secara keseluruhan realisasi PAD tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan realisasi dengan tahun 2021, tetapi dari komponen PAD berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya upaya-upaya atau strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan PAD utamanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, antara lain:

1. Intensifikasi penerimaan PAD dengan beberapa pendekatan antara lain:

- Peningkatan kualitas layanan pembayaran pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi bekerjasama dengan pihak perbankan dan *e-commerce*, seperti pembayaran PBB melalui Indomaret, Alfamaret, Mobil Banking, OVO, Tokopedia dan Go Pay, serta Pembayaran BPHTB dan pajak daerah lainnya melalui mobil banking dan *virtual account* (VA) BNI dan Bank Jatim.
- Optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang.
- Mendekatkan layanan pembayaran kepada masyarakat/wajib pajak dan retribusi melalui mobil keliling, tempat pembayaran PBB di kelurahan, melayani pembayaran di Mal, Car Free Day dan event-event tertentu.
- Menyampaikan Surat Tagihan Piutang Kepada WP secara *door to door* dan menerima penagihan melalui aplikasi android jika WP berkenan.
- Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan kegiatan pembinaan dan pemeriksaan pajak.
- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang berkenaan dengan perubahan data.
- Penyampaian SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) tepat waktu.
- Mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan.
- Peningkatan kapasitas SDM dengan mengadakan kegiatan bimtek dan sosialisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Penyusunan SOP pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Memperkuat pengawasan dan pemeriksaan dengan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kejaksaan.
 - Melakukan sosialisasi yang intensif melalui berbagai media dan acara/kegiatan.
2. Ekstensifikasi penerimaan PAD, melalui beberapa pendekatan antara lain:
- Membuat kajian tentang sumber-sumber pendapatan daerah.
 - Melakukan pemutakhiran atau validasi data pajak daerah/retribusi daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pendekatan pengecekan atau pendataan ulang obyek-obyek pajak dan retribusi yang ada di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah.
 - Menyusun draft rancangan perda kenaikan tarif yang rencananya akan dibahas pada tahun 2023.
- b. Prosentase piutang pajak/retribusi yang tertagih terealisasi sebesar 88,08% (tidak mencapai target). Kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan banyaknya piutang macet dan piutang kadaluarsa yang tidak dapat tertagih disisi lain piutang terus bertambah setiap tahunnya. Solusi atau langkah untuk mencapai target ini pada tahun-tahun selanjutnya adalah disusunnya perwali tentang penghapusan piutang agar piutang-piutang yang sudah tidak mungkin lagi tertagih dapat dihapus. Selain itu juga dilakukan upaya kerjasama dengan Kejaksaan untuk menagih piutang-piutang yang besar.
- c. Prosentase kepatuhan WP terealisasi sebesar 88,31% (tidak mencapai target). Penyebab tidak terealisasinya indikator ini kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak akan kewajibannya dalam hal membayar pajak daerah masih rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dikarenakan:
- Prasangka negatif kepada aparat perpajakan yang harus digantikan dengan prasangka positif.

- Bagi Calon Wajib Pajak, Sistem Self Assessment dianggap menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindari dari kewajiban ber-NPWP.
- Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan daerah dan segi-segi positif lainnya.
- Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata dan meluas.
- Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah daerah terhadap penggunaan uang pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dilakukan kegiatan pembinaan dan pemeriksaan pajak. Selain itu juga dilakukan kegiatan sosialisasi baik melalui tatap muka dan berbagai lewat bermedia baik media cetak, televisi, radio dan media sosial.

✚ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	WTP	WTP	100	19.681.907.862	11.262.127.495	57%	43%
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	WTP	WTP	100	18.429.476.562	10.245.569.221	56%	44%
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	43%	43%	100	1.252.431.300	1.016.558.274	81%	19%
4	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja	A	A	100	26.397.267.605	25.663.287.677	97%	3%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	BPPKAD							
5	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	75%	60%	85	21.859.400	18.690.050	85%	Tidak terdapat efisiensi
		75%	75%	100	25.894.464.205	25.165.784.540	97%	3%
		73	81,56	111,7	480.944.000	478.813.087	99%	1%
6	Tujuan 3: Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	21%	21,97%	104,62	5.027.028.313	4.719.190.539	94%	6%
7	Sasaran 3.1 Meningkatnya PAD	1,25%	-27,42%	-2194	1.603.887.653	1.490.006.200	93%	Tidak terdapat efisiensi
		12%	10,57%	88,08	475.242.029	417.776.958	88%	Tidak terdapat efisiensi
		70%	61,82%	88,31	2.947.898.631	2.811.407.381	95%	Tidak terdapat efisiensi

Sumber : Data realisasi yang diolah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk pencapaian indikator tujuan, BPPKAD telah memanfaatkan sumber dayanya terutama sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan dan terdapat efisiensi. Sedangkan dalam pencapaian indikator sasaran, pada tahun 2022 BPPKD belum memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai indikator sasaran sebesar 100%.

✚ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD Pemda	100	Program : 1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dengan target WTP	100	Menunjang
	Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKPD Pemda	100	Kegiatan: 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	1. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	Menunjang
	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	% golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	85	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang
	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP BPPKAD	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. % keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran 2. % cakupan administrasi keuangan 3. % cakupan administrasi kepegawaian 4. % cakupan administrasi umum 5. % sarana dan prasarana dalam kondisi baik	60 100 100 100	Menunjang
	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	% pemenuhan kriteria Renja berkualitas	111,7	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100	Menunjang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		%pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	88,08	Kegiatan: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan, umum, pengadaan BMD, penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan BMD	100	Menunjang
		Nilai Indeks profesionalisme aparatur	-2194	Kegiatan: 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan bimtek, sosialisasi	100	Menunjang
	Tujuan 3: Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (dlm %)	88,31%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase kenaikan PAD	-27,42	Menunjang
	Sasaran 3.1 Meningkatnya PAD	% Kenaikan PAD	100%	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100	Menunjang
		% Jumlah Piutang Pajak/ Retribusi yang tertagih	100%	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100	Menunjang
		% kepatuhan WP	85%	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100	Menunjang

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2022 yang dikelola BPPKAD sebesar Rp 1.453.556.698.954,24 dari target sebesar Rp. 1.376.290.597.717,00. Realisasi Pendapatan Tahun 2022 berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan Transfer
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara terperinci Realisasi Pendapatan yang dikelola Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dapat digambarkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Realisasi Pendapatan Badan BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
4	PENDAPATAN	1.376.290.597.717,00	1.453.556.698.954,24	105,61
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	316.065.572.667,00	319.295.604.320,24	101,02
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	125.355.000.000,00	137.509.757.025,00	109,70
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	32.715.788.500,00	25.328.365.948,00	77,42
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.959.290.344,00	1.981.685.048,28	101,14
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	156.035.493.823,00	154.475.796.298,96	99,00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.060.202.484.050,00	1.133.953.936.329,00	106,96
4 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat	940.879.373.470,00	1.013.587.223.312,00	107,73
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	924.598.130.470,00	986.070.144.312,00	106,65
4 . 2 . 1 . 2	Dana Insentif Daerah (DID)	16.281.243.000,00	27.517.079.000,00	169,01
4 . 2 . 2	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	119.323.110.580,00	120.366.713.017,00	100,87
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	116.799.506.580,00	117.725.509.017,00	100,79
4 . 2 . 2 . 2	Bantuan Keuangan	2.523.604.000,00	2.641.204.000,00	104,66
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	22.541.000,00	307.158.305,00	1.362,66
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	0,00	242.450.000,00	0,00
4 . 3 . 3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	22.541.000,00	64.708.305,00	287,07

3.2.2 Belanja

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya selain faktor pendukung maka aspek

keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk melihat Pembiayaan selama tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.434.117.605	24.771.721.277	93,71%
	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.859.400	18.690.050	85,50%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.290.100	5.674.550	77,84%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.294.900	6.022.500	82,56%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.274.400	6.993.000	96,13%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.261.241.118	20.858.112.030	93,70%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.918.521.118	20.533.790.230	93,68%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	342.720.000	324.321.800	94,63%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.700.000	66.298.000	96,50%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000	49.000.000	98,00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.700.000	17.298.000	92,50%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	836.711.427	829.459.754	99,13%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.083.000	19.050.000	99,83%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.162.200	120.333.398	96,92%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	103.121.600	101.338.399	98,27%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	17.317.200	17.214.800	99,41%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.974.600	12.942.500	99,75%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	539.728.827	538.807.337	99,83%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No.	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.324.000	19.773.320	97,29%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	994.297.800	951.716.400	95,72%
	Pengadaan Mebel	86.850.000	79.325.000	91,34%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	907.447.800	872.391.400	96,14%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.655.065.060	1.476.927.568	89,24%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.597.000	85.603.350	72,79%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	621.999.940	576.656.749	92,71%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	915.468.120	814.667.469	88,99%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.242.800	570.517.475	95,69%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.884.500	105.595.175	84,55%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	229.988.300	229.417.300	99,75%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.370.000	235.505.000	97,57%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	18.429.476.562	10.245.569.221	55,59%
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.056.593.900	799.331.473	75,65%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	62.797.800	37.397.080	59,55%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	63.850.100	46.354.527	72,60%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	33.539.500	12.162.530	36,26%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	13.646.000	11.657.868	85,43%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	135.316.600	109.395.105	80,84%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	149.944.800	137.966.376	92,01%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	294.001.100	184.580.691	62,78%
	Koordinasi dan Pengelolaan	701.229.200	677.690.318	96,64%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No.	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perbendaharaan Daerah			
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	68.375.000	65.015.813	95,09%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	136.901.800	135.684.241	99,11%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	204.755.400	203.452.684	99,36%
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	291.197.000	273.537.580	93,94%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.038.364.900	749.104.639	72,14%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	36.393.000	26.038.633	71,55%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	31.355.500	25.137.195	80,17%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	487.208.000	423.285.595	86,88%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	298.888.400	182.799.450	61,16%
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	184.520.000	91.843.766	49,77%
	Penunjang Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.633.288.562	8.019.442.791	51,30%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.633.288.562	8.019.442.791	51,30%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.252.431.300	1.016.558.274	81,17%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.252.431.300	1.016.558.274	81,17%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

No.	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15.185.500	13.330.100	87,78%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	384.346.100	289.197.900	75,24%
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	271.083.800	217.792.637	80,34%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	61.472.900	51.903.022	84,43%
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	432.903.700	398.638.215	92,08%
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	61.704.000	35.696.300	57,85%
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	25.735.300	10.000.100	38,86%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.027.028.313	4.719.190.539	93,88%
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.027.028.313	4.719.190.539	93,88%
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.178.761.500	1.151.044.200	97,65%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	649.856.631	619.764.561	95,37%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	758.259.800	718.429.799	94,75%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	409.296.853	389.734.540	95,22%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	436.331.000	381.841.861	87,51%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.000.924.500	934.985.420	93,41%
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	45.713.910	38.597.238	84,43%
	Penagihan Pajak Daerah	391.711.800	355.166.080	90,67%
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	37.816.319	24.013.640	63,50%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	118.356.000	105.613.200	89,23%
	JUMLAH	51.143.053.780	41.674.680.000	81,49%

Sumber : Data Realisasi yang diolah



Dilihat dari perkembangan belanja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Daerah Kediri tahun 2022 Dengan keseluruhan belanja sebesar Rp.51.143.053.780,00 dan terealisasi sebesar Rp.41.674.680.000 atau 81,49%. Seluruh belanja tahun 2022 dibiayai dari APBD Kota Kediri sebelum dan setelah perubahan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu realisasi tidak melebihi anggaran. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2021) dari anggaran sebesar Rp1.619.807.994.940,00 Terealisasi sebesar Rp 1.344.272.318.953,32 Atau 82,99 % maka terdapat penurunan realisasi sebesar 1,50 %.

B A B I V P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP) BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) BPPKAD Kota Kediri Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja BPPKAD Kota Kediri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja BPPKAD Kota Kediri tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja tujuan sebanyak 3 (tiga) tujuan, dan ke-3 (tiga) indicator tujuan tersebut dapat tercapai. Indikator tujuan tersebut adalah :
 - a. Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel, dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD Pemda terealisasi 100% dengan kategori kinerja **sangat tinggi**.
 - b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD dengan indicator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BPPKAD terealisasi 100% dengan kategori kinerja **sangat tinggi**
 - c. Terwujudnya kemandirian keuangan daerah dengan indikator kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terealisasi 104,62% dengan kategori kinerja **sangat tinggi**
2. Sasaran strategis sebanyak 4 (empat) sasaran dan 8 (delapan) indicator kinerja, dengan 4 (empat) sasaran dapat tercapai dan 4 (empat) sasaran tidak dapat tercapai, yaitu :
 - a. Opini BPK terhadap LKPD Pemda terealisasi 100% dengan kategori kinerja **sangat tinggi**.
 - b. Prosentase golongan asset yang sudah terinventarisasi dengan baik tercapai 100% dengan kategori kinerja **sangat tinggi**.
 - c. Prosentase pemenuhan kriteria renja berkualitas dengan realisasi 85% dengan kategori kinerja **tinggi**.
 - d. Prosentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas tercapai 100% dengan kategori kinerja **sangat tinggi**
 - e. Nilai indeks profesionalisme aparatur tercapai 111,7% dengan kategori kinerja **sangat tinggi**.
 - f. Prosentase kenaikan PAD tercapai -2194% dengan kategori kinerja **sangat rendah**.
 - g. Prosentase piutang pajak/retribusi yang tertagih tercapai 88,08% dengan kategori kinerja **tinggi**

- h. Prosentase kepatuhan WP tercapai 88,31% dengan kategori kinerja **tinggi**.

Capaian ini menunjukkan adanya komitmen Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal-hal yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

1. Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan semua Instansi yang terkait telah terbina.
2. Manajemen kerja yang transparan dari semua bidang/kepala bidang.
3. Dana yang cukup serta sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai dan sistem informasi yang sudah terintegrasi.
4. Dukungan dan tanggapan positif dari Kepala Daerah terhadap hasil kerja yang dicapai.
5. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari pemeriksa baik dari Inspektorat maupun BPK.
6. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Meskipun banyak indikator yang tercapai, bukan berarti tidak terdapat kendala/hambatan dalam pencapaian target. Faktor kendala/penghambat keberhasilan kinerja BPPKAD Kota Kediri antara lain:

1. Terkait pengelolaan pendapatan
 - ❖ Tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak yang masih rendah.
 - ❖ Data yang tidak ter up to date yang menyebabkan surat tagihan yang tidak sampai kepada WP (dikarenakan alamat subyek pajak tidak sama dengan obyek pajak ; peralihan hak kepemilikan tidak disertai dengan mutasi SPPT PBB) sehingga menyulitkan petugas dalam penyampai SKPD dan penagihannya.
 - ❖ Belum dapat diterapkannya punishment secara penuh pada WP/WR yang tidak mau membayar.
 - ❖ Belum adanya SDM Juru Sita yang terlatih.
 - ❖ Belum dapat dihapusnya piutang yang macet/kadaluarsa
2. Terkait pengelolaan keuangan
 - ❖ SDM yang ditunjuk oleh SKPD untuk sebagai pengelola keuangan dan pembuat laporan yang kurang kompeten
 - ❖ permasalahan seputar penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain regulasi system akuntansi yang terus berubah dan terkadang saling bertentangan
 - ❖ Kurangnya tenaga dibidang Informasi dan Teknologi
 - ❖ Ruang pelayanan dan penyimpanan yang kurang memadai dan tidak adanya ruang penyimpanan sehingga menyulitkan dalam pencarian dokumen.
3. Terkait Pengelolaan Aset
 - ❖ Lambatnya Proses penghapusan yang membutuhkan waktu lama karena adanya ketergantungan dengan instansi lain (KPKNL)
 - ❖ Lambatnya Proses pensertifikasian yang harus menggunakan pertimbangan teknis dari pertanahan setiap kali pengajuan.

- ❖ SDM yang ditunjuk oleh SKPD sebagai pengurus barang yang kurang kompeten, sehingga menyebabkan pengelolaan BMD menjadi kurang optimal
- ❖ Koordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran SKPD yang belum berjalan dengan baik.
- ❖ Orientasi pengadaan barang selama ini hanya membeli dan bukan mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan pengadministrasian dan pengendalian secara layak.
- ❖ Banyaknya aset yang tidak didukung dengan data yang handal (keterbatasan data).

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan seperti telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terkait pengelolaan pendapatan
 - ❖ Melakukan sosialisasi dan membangun trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak serta memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak;
 - ❖ Melakukan koordinasi dengan kelurahan domisili wajib pajak dan melakukan sosialisasi terhadap WP agar segera mengurus peralihan hak kepemilikan.
 - ❖ Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan dalam penagihan pajak/retribusi yang bermasalah
 - ❖ Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM melalui diklat, bimtek.
 - ❖ Meningkatkan koordinasi antar OPD dinas penghasil.
 - ❖ Penyusunan Peraturan Walikota tentang penghapusan piutang dan penyesuaian tarif.
2. Terkait pengelolaan keuangan
 - ❖ Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM melalui diklat, bimtek, seminar, workshop, coaching clinic dll
 - ❖ Koordinasi, berdiskusi, coaching clinic dengan instansi terkait menyepakati masalah perbedaan aturan untuk pemantapan regulasi.
 - ❖ Menambah jumlah pegawai IT dan administrasi
3. Terkait Pengelolaan Aset
 - ❖ Melakukan koordinasi yang intens dengan pihak KPKNL dan BPN.
 - ❖ Meningkatkan kualitas SDM pengurus barang melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala, dan membuka konsultasi bagi SKPD
 - ❖ Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan bendahara pengeluaran terkait belanja modal
 - ❖ Melakukan pengecekan/ inventarisasi secara periodik
 - ❖ Melakukan inventarisasi aset



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja BPPKAD Kota Kediri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPPKAD Kota Kediri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Kediri

Kediri, Pebruari 2023
**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KOTA KEDIRI**

SUGENG WAHYU P, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19750625 199803 1 004



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUGENG WAHYU P, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kediri

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **ABDULLAH ABU BAKAR**

Jabatan : Walikota Kediri

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, Januari 2022

Pihak Kedua,



ABDULLAH ABU BAKAR

Pihak pertama,



SUGENG WAHYU P, SE, M.Si
NIP. 19750625 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KEDIRI

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP
2.	Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	21%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.611.186.591,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 20.887.373.200,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.148.022.300,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.679.448.313,-	APBD

Kediri, Januari 2022

Walikota Kediri


ABDULLAH ABU BAKAR

Kepala Badan Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kediri


SUGENG WAHYU P. SE, M.Si
NIP. 19750625 199803 1 004

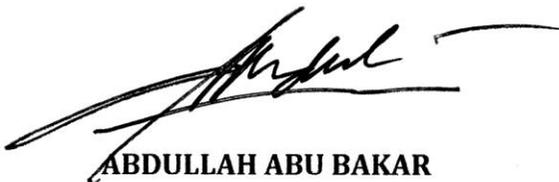
**Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022****PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022****KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KEDIRI**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	Persentase golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	57%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	75%
		Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	75%
		Nilai Indeks profesionalisme aparatur	73%
4	Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	% jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih	12%
		Persentase Kenaikan PAD	1,25%
		% kepatuhan WP	70%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.434.117.605,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 18.429.476.562,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.252.431.300,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.027.028.313,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 51.143.053.780,-	

Kediri, 2022

Walikota Kediri



ABDULLAH ABU BAKAR

Kepala Badan Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kediri



SUGENG WAHYU P. SE, M.Si
NIP. 19750625 199803 1 004

**Lampiran 3 Matriks Renstra**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					Bidang Pemangku
				2020		2021	2022	2023	2024		
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi; Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	% golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	14%	14%	29%	43%	57%	71%	Pengelolaan Aset	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	N/A	60%	75%	75%	80%	85%	Sekretariat	
			Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	N/A	60%	75%	75%	80%	85%	Sekretariat	
			Nilai Indeks profesionalisme aparatur	N/A	71,00	72,11	73,00	74,00	75,00	Sekretariat	
3	Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatnya PAD	% Kenaikan PAD	3%	-1,45%	1%	1,25%	1,50%	1,75%	Pembukuan dan Pelaporan;	
			% Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang tertagih	13%	8%	10%	12%	15%	17%	Pendataan dan Penetapan	
			% kepatuhan WP		5%	7%	9%	11%	13%	Pengendalian Operasional	

**Lampiran 4 LHE SAKIP BPPKAD Tahun 2021****INSPEKTORAT KOTA KEDIRI**

Jl. Sekartaji No. 10 Kediri - Jawa Timur 64182

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021
PADA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI**

Nomor : 700/690/419.060/2022

tanggal 28 April 2022

**Kepada:
KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI
di
KEDIRI**



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
INSPEKTORAT

Jl. Sekartaji No. 10 Telp. (0354) 687305

KEDIRI 64182

Nomor : 700 / ~~690~~ / 419.060 / 2022

Kediri, 28 April 2022

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri
Tahun 2021

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Kediri
di
Kediri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri (BPPKAD) Kota Kediri memperoleh nilai 82,4 (Delapan Puluh Dua Koma Empat) atau predikat "A". Penilaian tersebut menunjukkan *unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator*. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen	2020		2021	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,45	30	24,6
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,94	30	24
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,03	15	10,8
d.	Evaluasi Internal	10	8,18	25	23
e.	Capaian Kinerja	20	14,50	-	-
Jumlah		100	81,10	100	82,4

Secara umum penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sudah berjalan secara baik, memuaskan dan berkelanjutan. Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Rencana Aksi atas kinerja telah dipantau secara berkala triwulan namun belum menyampaikan informasi atas hambatan dan rekomendasi yg harus di tindak lanjuti
2. Pengukuran kinerja telah dilakukan dan dipantau secara berkala melalui rapat staf evaluasi sikip yang dilakukan secara berkala (triwulan), namun belum terdapat pedoman teknis atas pengukuran kinerja OPD, serta belum memanfaatkan teknologi informasi / aplikasi (pengumpulan dan pengukuran hanya memanfaatkan aplikasi excel pada computer)
3. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya akan tetapi belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemantauan Rencana Aksi yang telah dilakukan agar menyampaikan informasi atas hambatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, hal ini ditujukan untuk mengendalikan kinerja lebih baik dan hasil evaluasi setiap periode / setiap triwulan menunjukkan perbaikan, serta menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (*action*) dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

2. Agar menyusun pedoman teknis pengukuran data kinerja
3. Dalam menyusun laporan kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kediri.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.


INSPEKTUR KOTA KEDIRI
WAHYU KUSUMA WARDANI, S.STP.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197602071996021002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Kediri.

**Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2021****PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp. (0354) 4674559 Fax (0354) 4674560 Kediri

Kediri, 19 Oktober 2022

Kepada:
Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat
Kota Kediri
di**KEDIRI****SURAT PENGANTAR**

Nomor: 700/1982 /419.201/2022

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Tanggapan LHE atas Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2021 Pada BPPKAD Kota Kediri beserta tindak lanjutnya.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menindaklanjuti Surat Saudara Tanggal : 28 April 2022 Nomor : 700/690/419.060/2022 Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KEDIRI**

25/10/2022

Yetti D.P.**SUGENG WAHYU P. SE, M.Si**

P e m b i n a

NIP. 19750625 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp. (0354) 4674559 Fax (0354) 4674560 Kediri

**TANGGAPAN LHE ATAS AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAHAN
BPPKAD KOTA KEDIRI TAHUN 2021**

NO	REKOMENDASI	TANGGAPAN
1.	Pemantauan Rencana Aksi yang telah dilakukan agar menyampaikan informasi atas hambatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.	Pada Tahun 2022, selain Evaluasi Renja dan Evaluasi Rencana Aksi, telah ada Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHE) Internal yang dibuat pertribulan, yang didalamnya juga terdapat hambatan dan rekomendasi sebagaimana LHE Internal tribulan I, II, dan III terlampir.
2	Agar menyusun pedoman teknis pengukuran data kinerja	Pada tahun anggaran 2021 dan 2022 telah ada SK Kepala BPPKAD tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pengumpulan Data Kinerja di Lingkup BPPKAD TA. 2021 (SK terlampir). Sedangkan untuk SOP Pengumpulan Data Kinerja telah ada SK Kepala BPPKAD Nomor: 188/148/SK/419.201/2022 Tentang SOP di Lingkup BPPKAD Kota Kediri dalam Lampiran SOP Nomor:16/BPPKAD/SEKRETARIAT/2022 (SOP terlampir)
3	Dalam menyusun laporan kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja)	Dalam penyusunan LkjIP Tahun 2022 yang akan datang akan kami bandingkan realisasi dengan target jangka menengah (kondisi akhir renstra). Sedangkan untuk membandingkan kinerja dengan level nasional/internasional tidak dapat dilakukan karena untuk indikator tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra BPPKAD terkait kinerja pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset tidak terdapat SPM (Standar Pelayanan Minimal) nya.

Kediri, Oktober 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KEDIRI


SUGENG WAHYU P. SE. M.Si

Pembina

NIP. 19750625 199803 1 004



Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2022

